

The Effect of Accountability, Effectiveness, and Transparency Government on Regional Financial Management

Ivana Diva Chrisninditya¹, Erma Setiawati²

¹Department of Economy, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Department of Economy, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ ivanadiva1414@gmail.com, ermasetiawati64@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and examine the effect of government accountability, effectiveness, and transparency on local financial management. This research is a quantitative research. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires to urban villages in Surakarta City. The total sample used in this study was 120 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression model and analyzed using the SPSS version 25 program. The results showed that the accountability and transparency variables had a significant effect on regional financial management, while the effectiveness variable had no significant effect on regional financial management.

Keywords: *Accountability; Effectiveness; Transparency, Regional Financial Management*

Pengaruh Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada kelurahan di Kota Surakarta. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas; Efektivitas; Transparansi; Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia yaitu terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pemberdayaan, peningkatan mutu, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah disorot oleh masyarakat, yang mana pemerintah harus melaksanakan kewajiban dalam upaya pencapaian sasaran

atau tujuan instansi yang termasuk dalam visi dan misi pemerintah. Maka, otonomi daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan mengutamakan kepada rakyat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber serta penggunaan kewenangan harus diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Prinsip transparansi adalah semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum. Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Hal yang sering terjadi selama ini yaitu menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif dalam berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan daerah.

Mengingat begitu kompleks pengelolaan keuangan daerah disamping sumberdaya manusianya yang relatif terbatas apabila diukur dari aspek kualitas maka penulis berminat untuk melakukan analisis terhadap variabel-variabel yang menjadi tolak ukur pengelolaan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, efektivitas dan transparansi pemerintah dengan melakukan studi kajian pada perangkat daerah khususnya Kelurahan Kota Surakarta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan responsibilitas perangkat daerah Kota Surakarta untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Literatur Review

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah memiliki prinsip-prinsip diantaranya transparan, efektif, tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab.

Menurut Hendra Karianga (2017), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang mana pemerintah berfungsi sebagai public service, maka pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri dan salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu persepsi aparatur pemerintah daerah dalam upaya memberikan kejelasan arah. Semakin baik persepsi aparatur pemerintah daerah maka semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan daerah begitu pula sebaliknya.

2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kinerja dari aparat pemerintah mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan mampu melaporkan setiap pelaksanaan program secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala menyangkut saat sekarang atau masa depan antar individu, kelompok dengan menjelaskan tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui atau ditolak dengan harapan tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkan aktivitas dan pelaksanaan kinerjanya kepada publik. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh RR Hanafiah (2016) menemukan bukti bahwa akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Weni U (2017) yang menguji akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gerryan Putra (2015) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Debi Putri P (2015) bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H₁ : Akuntabilitas pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Efektivitas

Efektivitas yang berasal dari kata efektif dapat diartikan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Suatu organisasi, program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan mampu memenuhi target yang diharapkan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah target suatu instansi maka proses pencapaian tujuan keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi berjalan dengan baik. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam organisasi untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Maka dari itu, efektivitas dalam laporan keuangan dapat melihat bagaimana keuangan dimanfaatkan atau digunakan secara tepat dan memenuhi sasaran.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh R. H. Rondonuwu, J. J. Tinangon, dan Novi Budiarto (2015) menghasilkan bukti yang menyebutkan bahwa efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh A Trianto (2016) dalam penelitian ini berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang menyatakan bahwa rasio efektivitas mencapai tingkat yang efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega F. Syahril (2016) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan

Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung berpengaruh signifikan bahkan sangat efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yakni:

H₂ : Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2.4 Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Transparansi yang diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Selain itu, transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara.

Penting dan perlunya transparansi ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Kedua, perlunya transparansi ini adalah untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif apabila publik mendapatkan informasi mengenai pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatannya. Ketiga, bahwa publik berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (*right to inform and right to know*).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh T. Nurhadianto, Nur Khamisah (2019) transparansi berpengaruh rendah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerryan Putra (2017) yang memberikan bukti bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezky Mulya A (2014) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, penelitian Irna Setiyanningrum (2017) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga peneliti menduga ada pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H₃ : Transparansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan data primer dengan memperoleh data secara langsung dari sumber asli dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak pada kelurahan di Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga responden dapat menjawab permasalahan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam perangkat daerah memiliki kriteria pada setiap pegawai. Adapun proses dalam penentuan sampel peneliti menetapkan ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan, yaitu: memiliki masa kerja minimal satu tahun agar dalam menilai kinerja hasilnya lebih valid, pegawai dalam kelurahan turut berpartisipasi dalam menyusun anggaran, dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yaitu lurah.

4.1. Deskriptif Penentuan Sampel

Jumlah sampel yang disebar sebanyak 135 kuesioner, kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap sebanyak 15, sehingga penentuan sampel berdasarkan kriteria sebanyak 120 yang dapat diolah.

4.2. Penerapan Metode Analisis Data

1. Uji Validitas

Pada uji validitas ini, menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang digunakan untuk menguji penegasan dari teori pengukuran. Nilai KMO-MSA sebesar 0,790 yang artinya $> 0,50$ maka analisis faktor bisa dilakukan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsistensi dalam suatu konstruk. Instrumen dari variabel akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan PKD dinyatakan reliabel, disajikan pada nilai *Cronbach Alpha* pada variabel akuntabilitas sebesar 0,791, efektivitas sebesar 0,639, transparansi sebesar 0,687, PKD sebesar 0,868 yang mana masing-masing variabel $> 0,60$ atau lebih tinggi dari nilai standar.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Jumlah sampel yang diolah dari penelitian ini berjumlah 120. Pada variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 21,99 serta nilai standar deviasi sebesar 2,128 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai merata dan akuntabilitas perangkat daerah di Kota Surakarta cukup baik. Efektivitas dari 120 sampel diketahui nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 40, rata-rata total jawaban sebesar 31,96, serta nilai standar deviasi sebesar 2,495 yang artinya sumber daya yang dikelola perangkat daerah sudah dijalankan dengan baik dan efektif. Transparansi dari 120 sampel diketahui nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 45, rata-rata total jawaban sebesar 34,99, serta nilai standar deviasi sebesar 3,099 artinya pemerintah cukup baik dalam mengadakan informasi dan akses yang transparan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum sebesar 50, nilai mean 42,06, serta nilai standar deviasi sebesar 3,605 yang artinya pemerintah cukup baik dalam mengelola keuangan dan realisasinya.

4. Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *kolmogorov smirnov* yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Tingkat normalitas data dalam penelitian ini melalui uji kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan SPSS 25 for windows. Hasil penelitian

menunjukkan nilai pada baris *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

5. Uji Multikolinearitas

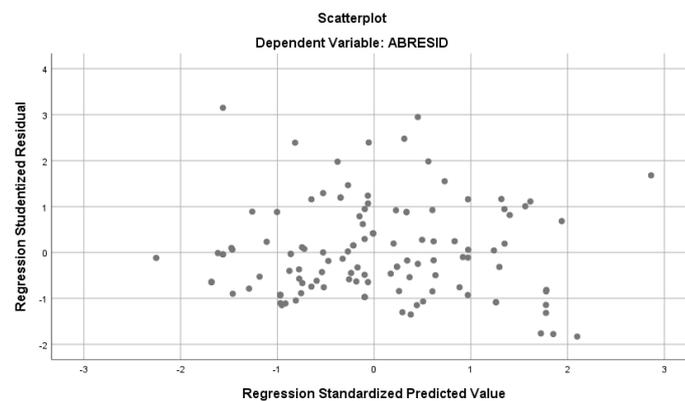
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa Akuntabilitas memiliki tolerance sebesar 0,848 dan VIF sebesar 1,179. Efektivitas memiliki tolerance sebesar 0,793 dan VIF sebesar 1,262. Transparansi memiliki tolerance sebesar 0,843 dan VIF sebesar 1,187. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF dibawah 10, menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

6. Uji Heteroskedastisitas

Analisis hasil output SPSS di atas terlihat bahwa titik-titik bisa dikatakan menyebar di bawah dan di atas angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka kesimpulannya variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



7. Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi yang akan melengkapi hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PKD = 8,030 + 0,413Akt + 0,184Ef + 0,545T + \epsilon$$

- Nilai konstanta sebesar 8,030 yang artinya bahwa apabila akuntabilitas, efektivitas dan transparansi diasumsikan tidak ada maka pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan meningkat sebesar 8,030.
- Nilai konstan dari koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,413 dengan tanda positif, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan variabel akuntabilitas akan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah yang mana semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah.
- Nilai konstan dari koefisien regresi sebesar 0,184 dengan tanda positif, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan variabel efektivitas akan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah yang mana semakin baik efektivitas maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah.

Nilai konstan dari koefisien regresi sebesar 0,545 dengan tanda positif, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan variabel transparansi akan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah yang mana semakin baik transparansi maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah.

8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil uji R^2 , diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,039 yang berarti sebesar 3,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebesar 3,9% oleh variabel independen yaitu akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pemerintah. Sedangkan 96,1% variasi pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini.

9. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) memengaruhi variabel dependen (Ghozali:2011). Apabila nilai F hitung \geq nilai F tabel dan probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 maka variabel independen dikatakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan model regresi dapat dikatakan layak.

Nilai Fhitung sebesar 28,386 dengan sig 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen (akuntabilitas, efektivitas dan transparansi) bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan daerah).

10. Uji t

a. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel akuntabilitas diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 3,186 dengan tingkat signifikansi 0,002 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98063. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,186 > 1,98063$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah.

b. Variabel efektivitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,610 dengan tingkat signifikansi 0,110 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98063. Oleh karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan perolehan nilai t_{hitung} $1,610 < t_{tabel}$ 1,98063 maka dapat dikatakan bahwa variabel efektivitas tidak berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah.

c. Variabel transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,093 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98063. Oleh karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan perolehan nilai t_{hitung} $6,093 > t_{tabel}$ 1,98063 maka dapat dikatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah.

Hasilnya disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Constant	2,036		0,044
Akuntabilitas	3,186	1,98063	0,002
Efektivitas	1,610	1,98063	0,110
Transparansi	6,093	1,98063	0,000

4.3 Pembahasan

a. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,186 dengan tingkat signifikansi 0,002 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98063. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,186 > 1,98063$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis pertama diterima (H_1 diterima). Akuntabilitas pemerintah merupakan kebijakan yang berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas organisasi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi dan juga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

b. Pengaruh Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,610 dengan tingkat signifikansi 0,110 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98063. Oleh karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan perolehan nilai t_{hitung} $1,610 < t_{tabel}$ 1,98063 maka dapat dikatakan bahwa variabel efektivitas tidak berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis kedua ditolak (H_2 ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R.H. Rondonuwu dkk (2015) dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa” menunjukkan hasil yang mencapai tingkat efektif. Dalam penelitian ini efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, artinya bahwa efektivitas pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah masih kurang maksimal.

c. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,093 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98063. Oleh karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan perolehan nilai t_{hitung} $6,093 > t_{tabel}$ 1,98063 maka dapat dikatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis ketiga diterima (H_3 diterima). Hasil dalam penelitian ini adalah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang artinya pemerintah mampu menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya atas tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada kelurahan se-kota surakarta). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini tidak luput dari berbagai keterbatasan meliputi metode pengumpulan data dengan kuesioner hanya dibagikan kepada satu lingkup perangkat daerah di Kota Surakarta, serta penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah sebesar 3,9%, sedangkan sisanya sebesar 96,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar metode penelitian ini.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan jumlah sampel di luar wilayah Kota Surakarta, serta menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi pengelolaan keuangan daerah seperti pengawasan, kejujuran, dan kapasitas sumber daya manusia.

Referensi

- [1] A. Merialsal, "Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada Inspektorat dan BPKAD Kota Bandung)," *J. Ilm. Akunt.*, pp. 14–65, 2017.
- [2] A. Trianto, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang," *Akuisisi J. Akunt.*, vol. 12, no. 1, pp. 65–77, 2016, doi: 10.24127/akuisisi.v12i1.92.
- [3] C. Y. Garung and L. L. Ga, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka," *J. Akunt. Transparansi Dan Akuntabilitas*, vol. 8, no. 1, pp. 19–27, 2020, doi: 10.35508/jak.v8i1.2363.
- [4] D. H. Saktiawati, "(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Indonesia)," vol. 3, no. 24, pp. 1381–1393, 2006.
- [5] F. Manimbaga, J. J. Sondakh, and S. Pinatik, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018 Analysis Of Effectiveness And Efficiency Of Regional Financial Performance Of Bitung City Government Budget Year 2014-2018 Jurnal EMBA Vol . 9 No 2 ," vol. 9, no. 2, pp. 982–992, 2021.
- [6] F. Sukmawati and A. Nurfitriani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)," *J. Ilm. Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, vol. 2, no. 1, pp. 52–66, 2019.
- [7] N. Budiarmo, J. Tinangon, and R. Rondonuwu, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa," *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 3, no. 4, pp. 23–32, 2015.
- [8] O. Y. Sakti, "Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek," 2015, [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/3029/>.
- [9] R. A. Nababan, M. Sihombing, and H. Thamrin, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi," *Anthr. J. Antropol. Sos. dan Budaya (Journal Soc. Cult. Anthropol.*, vol. 4, no. 1, p. 108, 2018, doi: 10.24114/antro.v4i1.10157.
- [10] R. A. Syahputra, "Pengaruh Akuntabilitas, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat," *Pengaruh Akuntabilitas, Value Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawas. Terhadap Pengelolaan Keuang. Drh. pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pus.*, 2018.
- [11] R. R. Hanafiah, S. Abdullah, and M. Saputra, "Pengaruh Akuntabilitas,

- Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara),” *J. Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala*, vol. 5, no. 4, pp. 77–86, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/5733>.
- [12] S. Fahri, “Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa,” *Skripsi Sekol. Tinggi Ilmu Ekon. “Yayasan Kel. Pahlawan Negara,”* vol. 91, no. 5, pp. 1689–1699, 2020.
- [13] S. H. S. Wijayanti, “Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah,” *Tesis*, pp. 1–155, 2008.
- [14] T. Pengelolaan, K. Pemerintah, D. Kabupaten, and I. Hulu, “131955-ID-pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawas,” pp. 163–177.
- [15] W. Ultrafiah, “Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan,” *Univ. Muhammadiyah Palembang*, 2017.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
